

ANALISIS PERBANDINGAN LKPD ANTARA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN KABUPATEN BLORA

Khairu Annisa¹, Sofhia Intan Fadillah², Nabila Anris Putri³, Ariq Shidqi⁴, Syukriy
Abdullah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Syiah Kuala

khairuannisa25@gmail.com¹

Received: 08-06-2024

Revised: 12-06-2024

Approved: 20-06-2024

ABSTRAK

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan LKPD antara Kab. Lima Puluh Kota dan Kab. Blora, yang terdiri dari unsur LKPD, LRA, LO, dan Neraca yang dimana setiap daerah kabupaten bisa berbeda nama akun dan rinciannya. Dalam analisis ini, penulis menggunakan metode analisis antara 2 daerah di Indonesia untuk menganalisis LKPD nya masing-masing daerah agar dapat mengetahui hasil dari LKPD, LRA, LO, dan Neraca antara kedua daerah. Penulis menemukan salah satu karakteristik kualitatif dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Keterbandingan atau Comparability, artinya antar Pemerintah Daerah bisa di perbandingkan LKPD nya jika menggunakan struktur dan kebijakan akuntansi yang sama. Hasil analisis LKPD ini akan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah antara dua kabupaten ini akan berdampak atau tidaknya kepada indikator seperti pendapatan asli daerah, belanja, dan efisiensi pengelolaan dana, yang dimana akan di terapkan nya metode dan kebijakan yang tepat untuk masing masing daerah.

Kata Kunci : LKPD, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Blora

PENDAHULUAN

Peraturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur pada UU Nomor 33 Tahun 2004. Sebagaimana isi dari UU Nomor 33 tahun 2004, pemerintah daerah pada prinsipnya mengatur mengenai pendanaan atas pelaksanaan otonomi daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi (*money follow function*). Dalam menjalani otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk melaksanakan roda pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga mampu mendorong peran masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah masing-masing (Amanda & Zulgani, 2020). Menurut Aji et al., (2018) bahwa Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari hasil mengembangkan potensi yang dimilikinya, hal itulah yang menjadi penentuan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut. Dalam penyajian informasi mengenai pelaporan keuangan, pemerintah daerah harus menyajikannya secara transparansi, partisipatif, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan peraturan pemerintah (Ningtyas & Widyawati, 2019).

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasi, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampirkan di laporan keuangan perusahaan daerah. Laporan keuangan tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, handal, dan dapat dipahami agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Pada Akuntansi Pemerintahan juga dikenal dengan teori komparatif. Teori komparatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan membandingkan sistem akuntansi pemerintah di berbagai negara atau yurisdiksi. Perbedaan laporan keuangan daerah dapat dibandingkan dengan menganalisis LKPD dari kedua daerah yang akan dibandingkan. Teori komparatif dapat menunjukkan bagaimana pilihan basis akuntansi memengaruhi pencatatan transaksi pada pelaporan keuangan (Jati, 2019). Pelaporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Salah satu karakteristik pelaporan keuangan pemerintah yaitu dapat dibandingkan. Informasi laporan keuangan dapat dikatakan berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya (Yusmanarti & Ekowati, 2019). Menurut Diani, (2014) Perbandingan ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Berdasarkan pemahaman dasar terkait laporan keuangan pemerintah dan informasi yang diperoleh mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), analisis sementara ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Blora. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya analisis rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD). Rasio efisiensi pendapatan asli daerah perlu dihitung untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh realisasi pendapatan. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi PAD. Hasil analisis ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pemahaman analisis kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Blora.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

- ✓ **Pengumpulan Data** : Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan Neraca dari Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Blora dikumpulkan dari sumber yang terverifikasi, seperti website resmi pemerintah daerah, dokumen publik, dan sumber data terpercaya lainnya.
- ✓ **Analisis Komparatif** : Data yang terkumpul dianalisis secara komparatif antara kedua daerah untuk mengevaluasi perbedaan nama akun dan rincian dalam LKPD, LRA, LO, dan Neraca. Perbandingan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian struktur dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh masing-masing daerah.
- ✓ **Interpretasi Hasil** : Hasil analisis diinterpretasikan untuk mengetahui kinerja keuangan masing-masing daerah. Fokus interpretasi meliputi aspek-aspek seperti pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan efisiensi pengelolaan dana, dengan mempertimbangkan dampak dari struktur dan kebijakan akuntansi yang berbeda.
- ✓ **Penyimpulan** : Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan dampak dari perbedaan struktur dan kebijakan akuntansi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Blora. Penyimpulan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk merekomendasikan metode dan kebijakan yang lebih sesuai untuk meningkatkan kinerja keuangan di masing-masing daerah.

Metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang perbandingan LKPD antara dua daerah berbeda, dengan mempertimbangkan kompleksitas struktur akuntansi dan kebijakan pemerintahan daerah yang berbeda pula.

KAJIAN TEORI

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah seperangkat pedoman, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk menyusun, menyajikan, dan mengungkapkan informasi keuangan entitas pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan dalam laporan keuangan pemerintah. Standar ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengukuran, pengungkapan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintah.

Keterbandingan (Comparability) dalam Akuntansi Pemerintahan

Keterbandingan merujuk pada kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan dari berbagai entitas pemerintah dengan cara yang relevan dan bermakna. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, keterbandingan diperoleh melalui penerapan standar akuntansi yang seragam dan konsisten di seluruh entitas pemerintah. Ini memungkinkan para pengguna informasi keuangan untuk membandingkan kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan efisiensi penggunaan sumber daya di antara berbagai entitas pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam negeri yang dapat digunakan sesuai dengan kebijakan daerah, tanpa ada ikatan kewajiban atau beban tertentu. Sumber pendapatan ini meliputi, antara lain, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah.

Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan publik lainnya sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan. Belanja daerah mencakup belanja langsung dan tidak langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah.

Efisiensi Pengelolaan Dana Publik

Efisiensi dalam pengelolaan dana publik mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya finansial secara optimal untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi pengelolaan anggaran yang efisien, pengendalian biaya yang baik, serta evaluasi terhadap kinerja keuangan dan operasional pemerintah daerah secara keseluruhan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota

Menganalisis pengaruh belanja modal dalam LRA dan beban modal dalam LO terhadap kenaikan aset tetap dalam neraca pada tahun yang sama. Berikut penyajian LRA dan LO tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 1.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA	2020	2019	%
Belanja Modal			
Jumlah Belanja Modal	152.712.089.645	252.910.521.752	-39,62%
Lo			
Beban Modal			
Beban Pemeliharaan	5.821.362.138	4.161.570.926	
Beban Bunga	0	0	
Beban Penyusutan & Amortisasi	125.359.640.103	118.342.195.533	
Jumlah Beban Modal	131.181.002.241	122.503.766.459	7%

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), bagian belanja modal menunjukkan penurunan aset tetap pada LRA sebesar -39,62% tahun 2020. Sedangkan pada LO mengalami kenaikan aset tetap karena LRA hanya mencatat realisasi pada tahun bersangkutan, sedangkan LO juga mencatat beban dari aset tetap sebelumnya.

Membandingkan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dengan LO (Laporan Operasi)

Tabel 2.
Perbandingan pendapatan LRA dengan pendapatan dalam LO

	LRA	LO	%	Selisih
Jumlah Pendapatan	1.209.471.396.990,61	1.148.425.953.675,61	2,59%	61.045.443.315

Nilai pendapatan yang dicatat pada LRA dan LO pada tahun 2020 menunjukkan bahwa, Pendapatan lebih besar dicatat pada LRA sebesar 2,59%. Umumnya LO akan mencatat nilai pendapatan lebih besar karena menggunakan basis akrual, akan tetapi jika pendapatan pada LRA lebih besar hal itu terjadi karena adanya pendapatan yang diakui oleh LRA dan tidak diakui oleh LO.

Tabel 3.
Perbandingan Belanja dalam LRA dengan beban dalam LO

	LRA	LO	%	Selisih
Jumlah Belanja/ Beban	1.063.823.655.942,37	1.117.778.198.948,03	2,47%	53.954.543.006

Dari hasil perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa belanja atau beban yang tercatat lebih besar pada belanja dalam LO 2020 dengan selisih 53.954.543.006. Hal ini disebabkan oleh perbedaan basis akuntansi yang digunakan serta komponen-komponen yang tertera dalam laporan tersebut. LRA menggunakan basis kas dan pencatatan aset modal yang diakui sebagai belanja modal, sedangkan LO menggunakan basis akrual dan pencatatan aset modal tidak diakui sebagai beban melainkan diakui sebagai aset.

Tabel 4.
Perbandingan Surplus/Defisit dalam LRA dan LO

	LRA	LO	%	Selisih
Jumlah Surplus/Defisit	(37.534.892.097,00)	(30.645.487.705,58)	10,10%	6.889.404.391

Nilai Surplus/Defisit yang dilaporkan pada LRA dan LO pada tahun 2020 menunjukkan bahwa, Surplus/Defisit pada LRA dilaporkan lebih besar dari LO sebesar RP6.889.404.391. Hal ini dikarenakan perbedaan basis yang digunakan sehingga terjadi perbedaan pelaporan nilai pendapatan dan beban/belanja yang berdampak pada surplus/defisit. Pada LRA Surplus/Defisit diperoleh dari Total penerimaan kas dikurangi Total pengeluaran kas, sedangkan dalam LO Surplus/Defisit diperoleh dari Total pendapatan yang diakui dikurangi Total beban yang diakui.

Analisis LKPD Kabupaten Blora

Menganalisis pengaruh belanja modal dalam LRA dan beban modal dalam LO terhadap kenaikan aset tetap dalam neraca pada tahun yang sama.

Tabel 5.
Penyajian LRA dan LO tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Blora

LRA	2020	2019	%
Belanja Modal			
Jumlah Belanja Modal	349.064.685.820	466.887.348.008	-25,24%
Lo			
Beban Modal			
Beban Pemeliharaan	27.261.458.772	20.985.328.616	
Beban Bunga	0	0	
Beban Penyusutan & Amortisasi			
Jumlah Beban Modal	27.261.458.772	20.985.328.616	30%

Penurunan aset tetap pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebesar -25,24%. Sedangkan kenaikan aset tetap pada Laporan Operasional adalah sebesar 30%. Perbedaan antara nilai kenaikan aset tetap pada LRA dan LO dikarenakan LRA hanya mencatat realisasi pada tahun tersebut, sedangkan LO juga mencatat beban dari aset tetap tahun sebelumnya.

Membandingkan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dengan LO (Laporan Operasi)

Tabel 6.
Perbandingan pendapatan LRA dengan pendapatan dalam LO

	LRA	LO	%	Selisih
Jumlah Pendapatan	2.127.946.961.535,00	2.086.414.846.690,20	0,99%	41.532.114.845

Nilai pendapatan yang dicatat pada LRA dan LO pada tahun 2020 menunjukkan bahwa, Pendapatan lebih besar dicatat pada LRA sebesar 0,99% Umumnya LO akan mencatat nilai pendapatan lebih besar karena menggunakan basis akrual, namun besarnya pendapatan pada LRA terjadi karena adanya pendapatan yang diakui oleh LRA dan tidak diakui oleh LO.

Tabel 7.
Perbandingan Belanja dalam LRA dengan beban dalam LO

	LRA	LO	%	Selisih
Jumlah Belanja/Beban	2.101.653.287.754,00	1.710.188.925.784,48	10,27%	391.464.361.970

Nilai belanja/beban yang dicatat pada LRA dan LO pada tahun 2020 menunjukkan bahwa, Beban lebih besar dicatat pada LRA sebesar Rp391.464.361.970. Hal ini dikarenakan perbedaan penggunaan basis, dimana LO menggunakan basis akrual sehingga mengakui beban secara keseluruhan termasuk yang diterima dimuka sedangkan belanja modal akan diakui sebagai aset bukan beban/belanja.

Tabel 8.
Perbandingan Surplus/Defisit dalam LRA dan LO

	LRA	LO	%	Selisih
Jumlah Surplus/Defisit	18.824.073.781,00	107.338.820.424,60	70,16%	88.514.746.644

Nilai Surplus/Defisit yang dilaporkan pada LRA dan LO pada tahun 2020 menunjukkan bahwa, Surplus/Defisit pada LO dilaporkan lebih besar dari LRA dengan selisih sebesar RP88.514.746.644. Hal ini dikarenakan perbedaan basis yang digunakan sehingga terjadi perbedaan pelaporan nilai pendapatan dan beban/belanja yang berdampak pada surplus/defisit.

Perbandingan LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Blora

Tabel 9.
Urutan Penyajian LKPD

SAP PP No.71 Tahun 2010	LKPD Kab. Lima puluh kota	LKPD Kab. Blora
LHP Atas Laporan Keuangan	<i>Sesuai</i>	<i>Sesuai</i>
Laporan Realisasi Anggaran	<i>Sesuai</i>	<i>Sesuai</i>
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	<i>Sesuai</i>	<i>Sesuai</i>
Neraca	<i>Sesuai</i>	<i>Sesuai</i>
Laporan Operasional	<i>Sesuai</i>	<i>Sesuai</i>
Laporan Arus Kas	<i>Sesuai</i>	<i>Sesuai</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	<i>Sesuai</i>	<i>Sesuai</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	<i>Sesuai</i>	<i>Sesuai</i>

Terdapat perbedaan penyajian LKPD antara LKPD Kab. Lima Puluh Kota dan LKPD Kab. Blora, namun perbedaan ini tidak melenceng dari Standar yang berlaku. Dimana pada LKPD Kab. Lima Puluh Kota disajikan informasi yang lebih detail mengenai kondisi

keuangan disana, seperti adanya "PENJELASAN DAN INFORMASI NON KEUANGAN" yang pada LKPD Kab. Tanggamus tidak disajikan.

Komponen LKPD

Tabel 10.
Pembandingan akun dalam neraca

	Aset Tetap	Aset Lancar
LKPD Kab. Lima Puluh Kota	Tanah	kas dan setara kas
	Peralatan dan Mesin	kas daerah
	Gedung dan Bangunan	Kas di Bendahara Penerimaan
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	kas di Bendahara Pengeluaran
	Aset Tetap Lainnya	kas di BLUD RSUD
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	kas di BLUD puskesmas
	Akumulasi Penyusutan Aset tetap	kas Dana BOS
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	kas lainnya
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	putang pendapatan
	Akumulasi Penyusutan JJ	piutang pajak
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	piutang retribusi
		piutang lain lain PAD yang sah
		piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan
		piutang transfer pemerintah lainnya
		piutang transfer pemerintah daerah lainnya
		piutang pendapatan bagi hasil pajak
		penyisihan piutang
		penyisihan piutang pendapatan
		persediaan
LKPD Kab. Blora	Aset Tetap	Aset Lancar
	Tanah	Kas di Kas Daerah
	Peralatan dan Mesin	Kas di Bendahara Penerimaan
	Gedung dan Bangunan	Kas di Bendahara Pengeluaran
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Kas di JKN
	Aset Tetap Lainnya	Kas di BLUD
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kas Lainnya	

	Akumulasi Penyusutan tetap	Kas setara kas
		Piutang Pajak
		penyisihan piutang pajak
		Piutang Pajak Netto
		Piutang Retribusi
		Penyisihan Piutang Retribusi
		Piutang Retribusi Netto
		piutang lainnya
		penyisihan piutang lainnya
		piutang lainnya neto
		belanja dibayar dimuka
		persediaan

	LKPD Kab. Lima Puluh Kota	LKPD Kab. Blora
Kas	15.145.768.088,53	78.672.318.539
Kenaikan/Penurunan Aset Lancar	- 3.261.896.523	- 15.129.072.206
Kenaikan/Penurunan Investasi Jangka Panjang	- 430.251.981.114	- 36.983.643.744
Kenaikan/Penurunan Aset Tetap	21.995.554.444	91.660.836.694
Kenaikan/Penurunan Kewajiban	- 3.529.600.003	- 10.344.424.066

	STATUS	
	LKPD Kab. Lima Puluh Kota	LKPD Kab. Blora
Kenaikan/Penurunan Aset Lancar	<i>Turun</i>	<i>Turun</i>
Kenaikan/Penurunan Investasi Jangka Panjang	<i>Turun</i>	<i>Turun</i>
Kenaikan/Penurunan Aset Tetap	<i>Naik</i>	<i>Naik</i>
Kenaikan/Penurunan Kewajiban	<i>Turun</i>	<i>Turun</i>

Tabel 11.
Pembandingan akun dalam LRA

	LKPD Kab.Lima Puluh Kota	LKPD Kab. Blora
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah
	Pendapatan Retribusi Daerah	Pendapatan Retribusi Daerah
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Proporsi PAD Terhadap Pendapatan	LKPD Kab. Lima Puluh Kota	LKPD Kab. BLora
Tabel 7.	86.666.035.373	600.375.320.603
Tabel 7.	1.260.169.657.778	2.127.946.961.535
Tabel 7.	7%	28%
Tabel 7.		
Tabel 7.	Jumlah	Status
Tabel 7.	7.646.192.795	<i>Defisit</i>
Tabel 7.	18.824.073.781	<i>Surplus</i>

Pembandingan akun dalam LO

Tabel 12.
Pendapatan LRA dan LO kedua daerah

	LKPD Kab.Lima Puluh Kota	LKPD Kab. Blora
Pendapatan LRA	1.260.169.657.778,00	2.127.946.961.535
Pendapatan LO	1.148.425.953.675,61	1.854.337.479.218
Surplus Pada LRA	111.743.704.102,39	273.609.482.317
Percentage%	5%	7%

Tabel 13.
Belanja/beban LRA dan LO

	LKPD Kab Lima Puluh Kota	LKPD Kab. Blora
Belanja LRA	1.143.091.242.841,00	2.218.621.748.586
Belanja LO	1.117.778.198.948,03	1.746.998.658.793
Surplus Pada LO	-25.313.043.892,97	-471.623.089.793

Percentage%	-1,12%	-11,89%
-------------	--------	---------

Perbandingan pendapatan pada LRA & LO antara LKPD Kab. Lima puluh kota dan LKPD Kab. Blora menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan pada Kab. Blora lebih besar dengan nilai 7% dibandingkan dengan Kab. Lima puluh kota sebesar 5%. Perbandingan belanja pada LRA & Beban pada LO antara LKPD Kab. Lima puluh kota dan LKPD Kab. Blora menunjukkan bahwa perbandingan lebih besar pada Kab. Blora sebesar 11,89% dibanding Kab. Lima puluh kota sebesar 1,12%.

Tabel 14.
Pembandingan penyajian CALK

	LKPD Kab.Lima Puluh Kota	LKPD Kab. Blora
Bab 1 Pendahuluan	Tersedia	Tersedia
Latar Belakang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Maksud dan Tujuan	Tersedia	Tersedia
Landasan Hukum	Tersedia	Tersedia
Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedia	Tidak Tersedia
Sistematika Penulisan	Tersedia	Tersedia
Bab 2 Perkembangan Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	Tersedia	Tersedia
Perkembangan Ekonomi Makro	Tersedia	Tersedia
Kebijakan Keuangan Daerah	Tersedia	Tersedia
Perubahan APBD	Tersedia	Tersedia
Pencapaian target kinerja APBD	Tersedia	Tersedia
Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	Tersedia	Tersedia
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	Tersedia	Tersedia
Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	Tidak Tersedia	Tersedia
Rasio Antar Pos Neraca	Tersedia	Tidak Tersedia
Rasio Antas Pos Laporan Realisasi APBD	Tersedia	Tidak Tersedia
Bab 4 Kebijakan Akuntansi	Tersedia	Tersedia
Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedia	Tersedia
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Tersedia	Tidak Tersedia
Tanggungjawab Pelaporan Keuangan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Periode Akuntansi	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen	Tidak Tersedia	Tersedia
Mata Uang Pelaporan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	Tersedia	Tersedia
Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	Tersedia	Tersedia
Penjelasan Pos-Pos Neraca	Tersedia	Tersedia
Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	Tersedia	Tersedia
Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	Tersedia	Tersedia
Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Tersedia	Tersedia
Laporan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	Tersedia	Tersedia
Bab 6 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan	Tersedia	Tersedia
Bab 7 Penutup	Tersedia	Tersedia

Perbedaan lainnya terletak pada landasan hukum yang disajikan oleh kedua LKPD, dimana LKPD Kab Lima Puluh Kota menyajikan 20 hukum dan LKPD Kab Blera menyajikan 18 hukum.

KESIMPULAN

Kedua kabupaten, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Blera, menunjukkan perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan mereka, tercermin dari beberapa indikator kunci seperti pendapatan asli daerah, belanja, dan efisiensi pengelolaan dana. Kabupaten yang mampu mengelola keuangan dengan lebih baik, seperti yang terlihat dari perbandingan akun dalam neraca, cenderung memiliki aset tetap yang lebih besar dan perbandingan pendapatan serta belanja yang lebih seimbang. Dalam konteks ini, Kabupaten dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik biasanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Kabupaten Blera diharapkan untuk memperbaiki kinerja keuangannya dengan fokus pada peningkatan pendapatan, pengelolaan belanja yang efisien, dan optimalisasi efisiensi pengelolaan dana. Sementara itu, Kabupaten

Lima Puluh Kota disarankan untuk meningkatkan pendapatan dan menjaga disiplin dalam pengeluaran belanja, guna memelihara dan meningkatkan indikator-indikator kinerja keuangan yang penting bagi daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, D. S. (2001). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin. Gramedia Pustaka Utama.
- Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justisia*, 8(1), 69-79.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Indonesia. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara RI Nomor 30 Tahun 2011. Sekretariat Negara. Jakarta
- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Sesila, G. P. A. J. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95–104.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/viewFile/4586/3521>
- Amanda, E., & Zulgani, Z. (2020). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Musi Rawas Periode 2007-2011. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 9(2), 129–139.
<https://doi.org/10.22437/jmk.v9i2.12042>
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Pengalaman Kerja Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Di Kabupaten Jembrana). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 3(1), 1–25.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 22(1), 1–14.
<https://doi.org/10.35591/whn.v22i1.145>
- Ningtyas, P. E., & Widyawati, D. (2019). Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(1), 1–14.
- Yusmaniarti, Y., & Ekowati, S. (2019). Laporan Keuangan Koperasi Berbasis Media Excel For Accounting (EFA). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 2(1).